

BAB I

ORIENTASI PERMASALAHAN

A. Latar Belakang

Tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini dan untuk masa yang akan datang adalah mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan produktif, inovatif, dan bersikap serta berperilaku kreatif yang tinggi, sehingga pada akhirnya menjadi modal dasar pembangunan nasional. Bukan hanya sekedar mampu dan terampil saja dalam melakukan suatu pekerjaan.

Kemampuan produktif dan sikap kreatif yang disebutkan di atas, menurut Cosmas Batubara (1988:2) merupakan masalah pokok dan sangat penting, sekaitan dengan gagasan mengenai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia itu, Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 menyatakan pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa bertujuan:

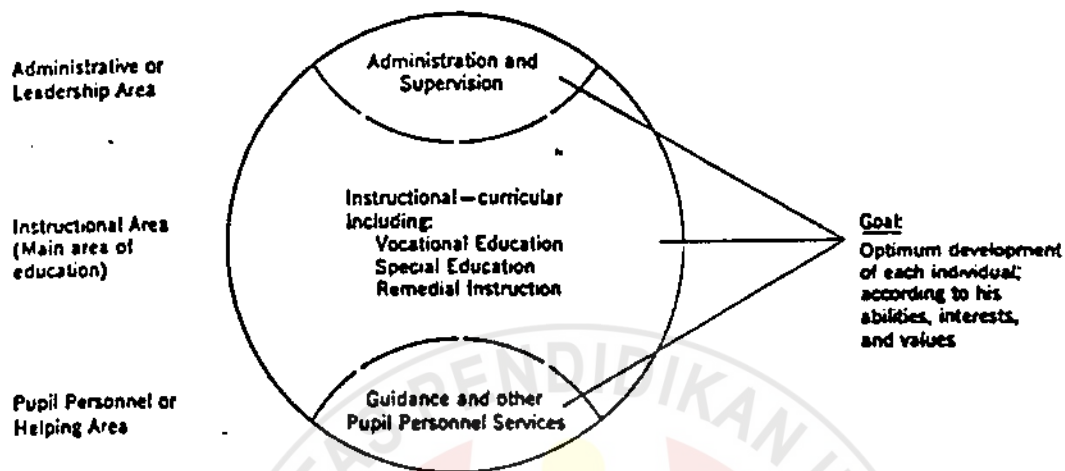
...meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada

sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa depan. Iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif dan keinginan untuk maju.

Rumusan pendidikan nasional tersebut di atas, mengimplikasikan bahwa diperlukan upaya yang sadar, berencana, dan sistematis untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui suatu pendidikan formal yang efisien dan efektif demi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia itu, maka sistem pendidikan formal (sekolah) setidaknya harus menjalankan dua misi utama menurut Cosmas Batubara (1988:2), yakni: (1) berkewajiban menyediakan sumber daya manusia yang bukan saja dalam jumlah yang banyak, akan tetapi berkualitas dan disiplin yang tinggi serta mampu menjadi inovator dan penggerak pembangunan; (2) berkewajiban menyediakan tenaga profesional yang bukan saja ahli dan terampil dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi mampu mengembangkan kemampuan tenaga kerja lainnya.

Sekolah menengah atas (SMA), dalam upaya mencapai yang telah digariskan dalam GBHN 1993 --meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia-- dalam penerapan proses membelajarkan di sekolah tidak semata-mata hanya mengandalkan unsur pengajaran (*instructional*) saja, akan tetapi melibatkan unsur lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Mortensen dan Schmuller (1964:7) pada bagan halaman berikut ini.



Bagan I:1 Bimbingan dan Pendidikan
(Mortensen & Schmuller, 1964 :7)

Gambar mengenai proses pendidikan tersebut, menunjukkan bahwa tujuan akhir dari ketiga bidang kegiatan pendidikan --pengajaran, administrasi dan supervisi, bimbingan-- adalah perkembangan diri yang optimum dari setiap siswa. Tujuan tersebut, sejalan dengan pandangan D. Darmodihardjo (1988:4) bahwa sesungguhnya hakikat pendidikan adalah berkenaan dengan upaya peningkatan perkembangan kepribadian manusia.

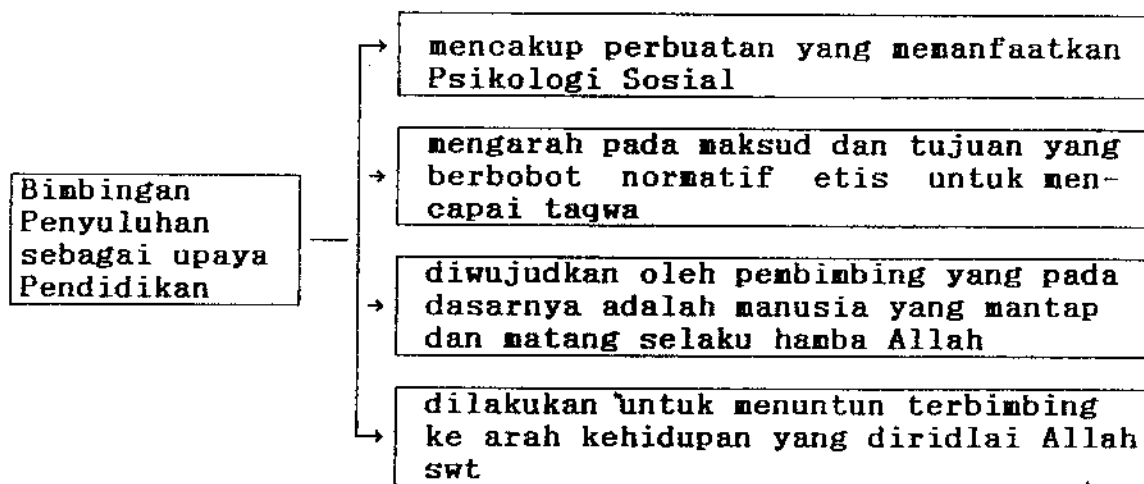
Mengapa di sekolah diperlukan layanan bimbingan ? Apa sebenarnya fungsinya dalam proses pembelajaran siswa di sekolah? Untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya sudah terjawab dari penjelasan ringkas terhadap gambar proses pendidikan yang dikemukakan Mortensen dan Schmuller di atas, namun berikut ini dikemukakan beberapa pandangan atau

pemikiran mendasar mengenai mengapa bimbingan itu diperlukan dalam kaitan dengan pendidikan, maupun secara operasional dalam kaitan dengan pelaksanaan programnya di sekolah.

M.D. Dahlan dalam kajiannya mengenai *Posisi Bimbingan dan Penyuluhan Pendidikan Dalam Kerangka Ilmu Pendidikan*, mengajukan suatu pembahasan mengenai kemengapaan bimbingan itu diperlukan secara lebih komprehensif. Ia mengemukakan kedua-duanya (pendidikan dan bimbingan dan penyuluhan) tidak dapat dipisahkan, bahkan dalam hal-hal tertentu sulit untuk dibedakan sebab kedua-duanya pada dasarnya pemberian bantuan bagi kepentingan anak. Lebih jauh dikatakannya:

Dengan memusatkan perhatian pada proses, dan kurang memperhatikan dasar dan tujuan tindakan yang diambil, bimbingan dan penyuluhan cenderung memperlihatkan tugasnya sebagai rangkaian upaya pemberian bantuan (fasilitator). Ditinjau dari suatu pendidikan, ia lebih tampak sebagai upaya pendidikan. Alasannya ialah bimbingan penyuluhan memberikan perhatian pada proses, oleh pendidikan dimanfaatkan dalam rangka membantu anak mencapai suatu tingkat kehidupan yang berdasarkan pertimbangan normatif, antropologis (memperhatikan anak selaku manusia) dan sosiokultural (M. D. Dahlan, 1988:22)

Pemikiran tersebut mengisyaratkan bimbingan dan penyuluhan yang berkiprah di sekolah merupakan upaya untuk mengejawantahkan makna pendidikan baik secara normatif, antropologis, maupun sosiokultural sebagaimana yang diamanatkan oleh GBHN 1993, yang antara lain menekankan pencapaian manusia yang berkualitas dan taqwa sebagai tujuan pendidikan. Dengan demikian, bimbingan dan penyuluhan sebagai upaya pendidikan mengandung berbagai dimensi, yang dalam analisis M. D. Dahlan, dimensi-dimensi itu tergambar pada bagan berikut ini.



Bagan I :2 Analisa Bimbingan sebagai upaya Pendidikan
(M. D. Dahlan, 1988:24)

Kajian yang lain mengenai kemengapaan bimbingan dan konseling itu diperlukan di sekolah, dikemukakan oleh Rochman Natawidjaja (1988:15) sebagai berikut:

Pertama-tama adalah kesadaran akan perbedaan-perbedaan diantara setiap manusia yang memerlukan perlakuan berbeda pula. Kedua adalah kesadaran akan perlunya sistem pengajaran dan pelayanan pendidikan lainnya yang lebih terpusat pada diri siswa. Ketiga adalah kesadaran akan perlunya penerapan konsep demokratis dalam upaya pendidikan secara tepat. Keempat kesadaran akan permasalahan yang dihadapi individu dalam kehidupan masyarakat beragam dan senantiasa berubah dan berkembang, memperhadapkan setiap individu kepada berbagai pilihan dan menuntut kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri. Kelima kesadaran akan rumit dan muskilnya persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan moderen yang membuat setiap kemudahan sangat cepat berubah menjadi kendala yang tak terkendali.

Hampir senada dengan pendapat M.D. Dahlan, Munandir (1989:12) mengemukakan bahwa perlunya bimbingan dan konseling di sekolah karena memiliki bidang singgung ajaran agama, budaya dan psikologi. Lebih jauh dikemukakannya, "bimbingan Indonesia" yang diterapkan di sekolah-sekolah harus memiliki ketiga corak tersebut itu.

Melihat kepada ketiga kemengapaannya bimbingan dan konseling itu diperlukan di sekolah, kiranya jelas serta beralasan kuat bahwa bimbingan dan konseling itu memiliki posisi kunci dalam proses pelajaran di sekolah. Menyangkut fungsi bimbingan di sekolah, Rochman Natawidjaja (1990:16) mengemukakan sebagai berikut:

Dalam pendidikan di sekolah, bimbingan dan konseling itu memiliki fungsi memberikan bantuan kepada siswa dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan, yaitu membantu meratakan dan meluruskan jalan menuju ke arah kehidupan mulia di hadapan Allah swt, berguna bagi sesama manusia dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan pembangunan bangsa dan umat. Fungsi itu diwujudkan dalam tindakan bantuan untuk mengembangkan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dalam menghadapi permasalahan sosial-pribadi, seiring dengan perkembangan akademik dan intelektual siswa.

Marilah kita lihat pendapat lain lagi, sekaitan dengan fungsi bimbingan di sekolah yang dikemukakan oleh M.D. Dahlan (1986:7) sebagai berikut:

...bimbingan bagi sekolah lanjutan berfungsi (a) menciptakan lingkungan yang memadai untuk para remaja, (b) memungkinkan terjadinya efisiensi belajar, (c) memungkinkan terjadinya kesinambungan belajar di sekolah dasar dengan sekolah lanjutan, (d) terciptanya suasana belajar yang memadai agar tidak terjadi drop-out, (e) terpenuhinya kebutuhan untuk berhubungan dengan lingkungan sosial dengan memperhatikan perbedaan individual, (f) menyiapkan kesempatan untuk memperoleh bimbingan pendidikan dan vokasional bagi para siswa, (g) menyiapkan kesempatan untuk eksplorasi tentang karir, bagi siswa.

Berdasarkan pada pendapat ke dua di atas tentang fungsi bimbingan di sekolah, yang dijabarkan ke dalam tujuh butir, dan jika dikaji secara mendalam terkandung makna di dalamnya agar individu (siswa) akhirnya memperoleh kemampuan untuk menahami dirinya sendiri (*self-understanding*), mampu menerima dirinya sendiri (*self-acceptance*), mampu membuat

pilihan yang realistik dan dapat mengarahkan diri (*self-direction*), secara adekuat dapat menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan --sekolah, masyarakat, dan keluarga-- (*self-restraint*), serta pada akhirnya mampu merealisasikan berbagai potensi yang dimiliki (*self-realization*) secara baik dan positif. Kesemuanya itu, akhirnya bermuara pada perkembangan diri pribadi siswa secara optimal.

Selanjutnya di bawah ini dikemukakan tinjauan BP3K, (1975:7) sekaitan dengan mengapa bimbingan dan penyuluhan itu penting dan fundamental di sekolah? dikemukakan alasan sebagai berikut: (a) adanya beberapa masalah dalam pendidikan dan pengajaran di sekolah yang tidak mungkin dapat diselesaikan guru; (b) kadang-kadang guru sebagai pengajar, terikat oleh tugas yang harus diselesaikan namun tugas itu bertentangan dengan kepentingan dan kehendak murid; (c) ada beberapa kegiatan dalam rangka mendidik siswa yang harus dilakukan oleh petugas sekolah yang bukan guru; (d) kadang-kadang terjadi konflik antara guru dengan murid yang memerlukan pemecahan melalui orang ketiga. Berdasarkan pada keempat alasan tersebut itu, maka penyelenggaraan program bimbingan diupayakan di sekolah-sekolah. Bahkan dalam kurikulum SMA (Depdikbud, 1981:5), dikemukakan hakikat bimbingan di sekolah menengah atas:

...proses bantuan khusus yang diberikan kepada siswa-siswa dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan kenyataan-kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal; sehingga mereka dapat memahami diri, dan bertindak serta bersikap sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.

Merujuk pada hakekat bimbingan tersebut, maka pemahaman dan pengarahan diri siswa adalah karakteristik utama menjadi perhatian dari kegiatan bimbingan di sekolah. Makna bimbingan mengisyaratkan bahwa terdapat kaitan operasional antara kegiatan bimbingan dengan tujuan program pengajaran di sekolah.

Sering ditemukan siswa yang mengalami kegagalan atau kurang berhasil dalam perkembangan kemampuan kognitif, yang ditunjuk oleh rendahnya prestasi belajar, sebenarnya diakibatkan oleh faktor-faktor yang non intelektual sifatnya. Misalnya motivasi kurang, ketidakstabilan emosi, suka menantang, dan sebagainya lagi. Hal-hal tersebut itu, menurut Wrenn (1962:5) dapat terjadi oleh karena siswa-siswa yang sedang dalam jenjang sekolah menengah atas berada pada suatu masa yang penuh dengan konflik. Erickson, menyebutkan masa konflik itu adalah sebagai "*critical period*" (Corey, 1982:49; Bischof, 1970:579). Bahkan lebih jauh dikemukakan oleh Rochman Natawidjaja (1990:14), bahwa para remaja yang berada dalam usia sekolah ibarat orang hanyut dari arus deras sehingga banyak yang menjadi korban ketidakmenentuan, sehingga pada dasarnya diperlukan perhatian khusus berupa layanan bimbingan untuk membantu mereka (siswa) dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul pada periode kritis itu.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dilihat dari segi kebutuhan akan perkembangan diri siswa dalam kaitannya

dengan pendidikan di sekolah, maka bidang kegiatan bimbingan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis oleh karena tidak hanya membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara pribadi oleh siswa, melainkan juga menyangkut dimensi-dimensi yang lebih luas guna mencapai suatu titik sasaran aktualitas diri yang optimum setiap siswa.

B. Permasalahan

Pada hakikatnya pengupayaan layanan bimbingan di sekolah adalah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan terhadap peserta didik. Khususnya pada sekolah tingkat lanjutan atas, penyelenggaraannya secara formal dapat dikatakan sejak dimasukkan ke dalam kurikulum tahun 1975, layanan bimbingan merupakan salah satu komponen integral dari sistem Kurikulum SMA.

Banyak upaya yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah, baik melalui jalur pendidikan *in-service training* --penataran, dan lokakarya--, maupun jalur pendidikan *pre-service training* yakni, mendidik calon-calon tenaga pembimbing profesional melalui lembaga-lembaga pendidikan tenaga pendidikan. Namun sampai sekarang ini, masih terdapat kesenjangan-kesenjangan antara harapan-harapan dengan kenyataan mengenai pelaksanaannya di sekolah. Dari segi keterlibatan guru saja, penelitian R. Natawidjaja (1984:22) menunjukkan bahwa ada kesenjangan, belum terjadi kongruensi di antara harapan (*expectation*), kesadaran dan pandangan (*awareness and perception*), serta pelaksanaan peran

itu (*enactment*).

Dalam kajian yang lain, mengenai mutu kemampuan petugas bimbingan di lapangan, R. Natawidjaja (1986:1), telah mencoba mengidentifikasi beberapa keresahan mengenai peran petugas BP di sekolah, sebagai berikut:

Lulusan jurusan BP yang langsung dipekerjakan di sekolah kami ternyata tidak mempunyai kemampuan seperti yang kami harapkan.

Lulusan jurusan bimbingan masih terlalu muda menangani masalah yang dihadapi di sekolah.

Petugas bimbingan yang baru lulus cenderung memperlihatkan sikap berhati-hati, sehingga bantuan yang diberikan kepada siswa di sekolah kami tidak efektif.

Sementara kajian Munandir (1986:2) menunjukkan bahwa sebenarnya keluhan pihak pengguna itu dialamatkan pada ketidaksiapan petugas BP pada saat mulai bekerja. Sedangkan pada sisi yang lain, Prayitno (1987:90) mengemukakan bahwa kekhususan tugas konselor itu sering kali tidak nampak baik oleh personil sekolah lainnya, juga oleh siswa. Oleh karena itu, bilamana konselor sekolah menampilkan peranannya sering kali menemui kekecewaan karena pihak-pihak lain di sekolah itu menganggap sepi atau menyepelkan peranan yang ditampilkan konselor tersebut.

Adapun, keresahan dan kecaman yang dialamatkan kepada kemampuan petugas yang diutarakan itu, apabila dikaji secara lebih mendalam adalah sebenarnya merupakan salah satu manifestasi dari kurang memadainya pelaksanaan layanan bimbingan dan penyuluhan yang dijalankan di sekolah. Keresahan-keresahan di atas, mengisyaratkan pula bahwa perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mungkin menjadi penyebab

ketidakmulusan pelaksanaan layanan BP di sekolah.

Selama ini kajian utama mengenai makna bimbingan di sekolah, baik secara konseptual maupun teoritis pada umumnya didasarkan deduksi-deduksi psikologis dan analisis empirik yang dikerjakan oleh para pakar peneliti bimbingan.

Tampaknya, salah satu permasalahan pokok yang belum begitu banyak diungkap dalam hubungan dengan pelaksanaan bimbingan di sekolah, adalah dari segi relevansinya terhadap kebutuhan para siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan kata lain, masalah yang cukup esensial itu menunjuk kepada apakah bimbingan yang dilaksanakan di sekolah relevan bagi siswa --sesuai dengan yang dibutuhkannya--.

C. Batasan Konsep yang Digunakan

Untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan tafsiran konsep yang digunakan dalam penelitian ini, kiranya perlu untuk beberapa hal diberikan batasan sebagaimana terurai di bawah ini.

1. Kebutuhan Siswa

Rochman Natawidjaja (1988: 21) mengemukakan prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam upaya pelaksanaan bimbingan di sekolah, yang antara lain:

...hendaknya bertitik tolak pada individu yang dibimbing. Perlu dikenal dan dipahami perbedaan individual orang-orang yang dibimbing, yaitu untuk memberikan bimbingan yang tepat, sesuai dengan apa yang dibutuhkan individu yang dibimbing itu ...Proses membantu individu untuk dapat membantu dirinya sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Secara khusus, BUKU III C, sebagai Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah Atas (Depdikbud, 1981: 7) mengemukakan beberapa kebutuhan pokok siswa yang menjadi tujuan operasional layanan bimbingan di sekolah. Yaitu: (1) dalam hubungan untuk memahami diri sendiri (siswa); (2) dalam hubungan untuk memahami lingkungan --sekolah, keluarga, dan masyarakat--; (3) dalam hubungan dengan mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapi; dan (4) dalam hubungan dengan menyalurkan kemampuan, minat, dan bakat dalam pendidikan, serta kemungkinan pekerjaan secara tepat. Tanpa melecehkan kedua konsep di atas, maka kebutuhan siswa dalam penelitian ini adalah kebutuhan akan layanan bimbingan --baik secara individual maupun secara kelompok--, yang berhubungan dengan kehidupan belajar di sekolah, pemilihan program studi dan jenis pekerjaan, masalah perencanaan dan pengembangan karir, masalah-masalah berhubungan dengan penyesuaian diri dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, kebutuhan siswa akan layanan bimbingan dalam penelitian ini adalah berhubungan langsung dengan upaya pencapaian secara utuh dan integral tujuan kurikuler yang telah ditetapkan sekolah, dan secara umum, dalam rangka perkembangan dan aktualisasi diri siswa yang optimal.

2. Pelaksanaan Layanan BP di Sekolah

Secara teoritis, pelaksanaan layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah sekurang-kurangnya meliputi empat

jenis kegiatan menurut Rochman Natawidjaja (1988: 19), yakni; (1) pengumpulan data tentang siswa dan lingkungannya; (2) penyuluhan dan konseling; (3) penyajian informasi dan penempatan; serta (4) penilaian dan tindak lanjut.

Miller (1978:152-157) berpendapat bahwa pelaksanaan BP di sekolah mencakup sepuluh bidang kegiatan, yakni: (1) Planning and development of guidance program; (2) Counseling; (3) Pupil appraisal; (4) Educational planning; (5) Refferal work; (6) Placement; (7) Parent help; (8) Staff consulting; (9) Local research; and (10) Public relations.

Lebih jauh lagi, Jerome A. Kroth (1973 : 116-117) mengatakan bahwa petugas BP (konselor) dalam peran dan fungsinya sebagai pelaksana program dan bimbingan di sekolah, melaksanakan delapan bidang kegiatan. Yakni: (1) Planning the guidance program; (2) Counseling; (3) Appraisal; (4) Vocational planning; (5) Placement; (6) Parent assistance; (7) Consultant; and (8) Research.

Sekaitan dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan pelaksanaan BP di sekolah: adalah keseluruhan rangkaian layanan bimbingan yang ada di sekolah, meliputi: (a) Perencanaan dan penyusunan program; (b) Penyediaan fasilitas dan pengadministrasian (c) Angket siswa dan Orangtua siswa; (d) Psikotes; (e) Analisis hasil belajar; (f) Observasi terhadap individu dan kelompok; (g) Pertemuan petugas BP dengan wali kelas; (h) Pertemuan petugas BP dengan orangtua siswa; (i) Pertemuan antarstaf BP; (j) Konferensi kasus; (k)

bimbingan karir (kelompok) dan; (1) Bimbingan individual.

3. Relevansi

Istilah relevansi berasal dari bahasa Inggris adalah *relevance*. Dalam *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary* (1989: 1212) disebutkan *Relevant (adj): bearing upon or connected with the matter in hand; to the purpose; pertinent; a relevant remark*.

Dalam penelitian ini, kata relevansi dimaksudkan adalah kesesuaian dan atau keterhubungan antara pelaksanaan bimbingan di sekolah dengan kebutuhan siswa. Dalam arti, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan itu dapat menjawab kebutuhan siswa yakni; agar mendapatkan informasi, pengenalan dan pemahaman, serta dapat mengatasi masalah pribadi, terhadap kebutuhan-kebutuhan yang telah diperoleh (butir B 1 Bab IV). Kecuali itu, yang dimaksudkan dengan relevansi adalah tidak sekedar melacak kesesuaian atau keterhubungan antara pelaksanaan bimbingan dengan kebutuhan siswa yang telah diperoleh akan tetapi menganalisis kelayakan layanan bimbingan yang dilakukan oleh petugas penyelenggara dengan kebutuhan siswa berdasar pada kriteria konseptual atau kajian teoritis, mengenai penyelenggaraan layanan BP yang seyogianya dijalankan terhadap siswa dalam proses pendidikan di sekolah.

D. Fokus Penelitian

Bertolak dari latar belakang pemikiran serta permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut

ini dirumuskan pokok penelitian, yang dikristalisasikan dalam suatu topik: *Layanan Bimbingan dan Penyuluhan Apa yang Dilaksanakan di Sekolah Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Siswa, dan Faktor-faktor Apa yang Turut Mempengaruhinya?* Untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut, maka penelitian dilakukan dengan cara Studi Kasus pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Aloysius Bandung.

Dari permasalahan pokok tersebut diturunkan beberapa masalah spesifik sebagai fokus penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Apa saja kebutuhan-kebutuhan siswa akan bimbingan di sekolah?
2. Kegiatan layanan bimbingan dan penyuluhan apa saja yang dijalankan di sekolah?
3. Bagaimana kesesuaian layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah dengan kebutuhan-kebutuhan siswa?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas serta obyektif tentang relevansi layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah dengan kebutuhan siswa. Secara khusus tujuannya adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan siswa akan bimbingan di sekolah.
2. Menemukan secara jelas tentang layanan bimbingan yang diselenggarakan di sekolah.

3. Menemukan kesesuaian antara layanan bimbingan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa terhadap penyelenggaraan bimbingan di sekolah.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan input kepada petugas BP tentang kebutuhan-kebutuhan siswa yang perlu diakomodasikan dalam penyelenggaraan bimbingan di sekolah.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini, lembaga yang menghasilkan tenaga petugas BP (Konselor) Sekolah Menengah Atas untuk "mengalokasikan" materi pelajaran pada keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dalam pengertian operasionalnya, perlu dibekali dengan pemahaman akan kondisi sosiokultural setempat sewaktu proses pembelajaran berlangsung di sekolah. Dengan pembekalan tersebut para calon petugas BP setelah bertugas di sekolah, akan mampu memberikan layanan bimbingan terhadap siswa-siswa sehingga pada akhirnya menaikkan pamor para petugas BP, yang selama ini disorot keberadaannya kurang berdaya dan berhasil guna.
3. Hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi petugas BP (konselor) Sekolah Menengah Atas dalam upaya mendalami, memahami, dan mengenal betul lingkup kegiatan tugasnya. Dengan mengetahui secara mendalam akan misinya itu, maka yang

diharapkan menjadi titik acuan pengimplementasian dari serentetan layanan BP yang dicanangkan adalah peserta didik; dengan segala "atribut" yang melekat pada dirinya.

